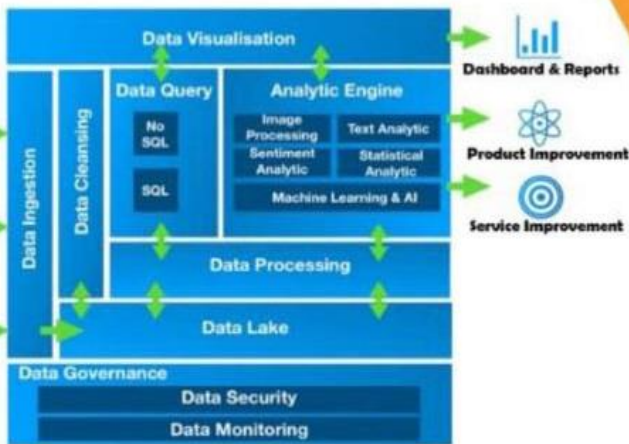




BIG DATA



**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan karunia-NYA, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Renja ini merupakan implementasi dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, serta Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021, dimana Dinkominfo Kabupaten Rembang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini, berisi tentang rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025. Renja ini diharapkan dapat memberikan informasi atas kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang yang lebih terukur, sekaligus sebagai arahan dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua dalam menjalankan mandat atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 ini, Amin.

Rembang, 29 Juli 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. E.C. GANTIARTO St
Rembang Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	30
2.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	46
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	53
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	56

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025	59
BAB V	PENUTUP	70
	5.1. Catatan Penting	70
	5.2. Kaidah Pelaksanaan	71
	5.3. Rencana Tindak Lanjut	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Rembang 8

Tabel 2.2. Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2023 18

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 28

Tabel 2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rembang 35

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang 45

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 54

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Tema RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah *“Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Rembang Gemilang Pembangunan”* dengan delapan prioritas, dimana salah satunya adalah *“Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah”*. Dalam rangka mewujudkan prioritas tersebut, salah satu strategi yang diambil adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *smart city*. Hal ini sejalan dengan salah satu program unggulan daerah sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD yaitu *“Digitalisasi Birokrasi & Rembang Smart City”* dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang berperan sebagai OPD pengampu untuk menyukseskan program unggulan tersebut. Strategi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional yaitu percepatan transformasi digital di seluruh aspek pembangunan, khususnya optimalisasi peranan teknologi digital dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Optimalisasi peranan teknologi digital dilakukan melalui peningkatan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, Satu Data Indonesia dan peningkatan layanan dasar berbasis digital.

Disisi lain peran komunikasi juga penting untuk memberikan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap semua informasi kebijakan sekaligus dalam rangka mencerdaskan masyarakat terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital dalam pemerintahan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan prioritas pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dilakukan melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, maka lini tugas pada bidang teknologi informasi dan komunikasi perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berperan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, guna mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera melalui peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Peningkatan tersebut dilakukan lewat perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dengan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan provinsi, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke 4(empat) dari pelaksanaan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 serta perwujudan dari program strategis pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini, telah melalui rangkaian proses panjang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan menelaah seluruh dokumen terkait, memperhatikan isu nasional, regional dan isu lintas sektoral.

Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tupoksinya. Renja ini disusun melalui pelaksanaan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para *stakeholders* terkait yang nantiya akan ditetapkan menjadi dokumen renja. Dokumen renja disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan renja perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang;
 17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Rembang;

19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian Kabupaten Rembang Tahun 2025;
2. Mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian tahun 2025 yang sinergis dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan operasional bagi unit kerja Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Menjadi landasan penyusunan usulan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 melalui penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V Penutup

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu proses peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dengan melakukan penilaian terhadap hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Evaluasi dilakukan guna mengetahui, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua periode pelaksanaan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan mendasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2023 yang telah dilaksanakan, Dinkominfo Kabupaten Rembang sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan baik. Dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Renstra, Dinkominfo Kabupaten Rembang melaksanakan 5 program, 10 kegiatan, 33 sub. Kegiatan. Sedangkan jumlah anggaran tahun 2023 sebesar Rp6.754.859.145,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp6.040.210.886,00 (89,4%). Adapun gambaran hasil pelaksanaan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2023 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan
Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Rembang

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD	82	81.38	82	81.75	99.7%	83	83	101%
		Nilai SAKIP OPD	72	71.12	72	75.26	105%	73	73	101%
		Persentase ketercapaian pelayanan umum	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	2	100%	2	2	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2	2	100%	2	2	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	3	3	100%	3	3	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	2	2	100%	2	2	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	2	100%	2	2	100%	3	3	150%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33	33	33	100%	32	32	
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3	1	1	100%	12	12	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1	100%	1	1	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	1	1	100%	1	1	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	12	12	100%	12	12	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	1	1	100%	12	12	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	100%	12	12	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1	1	100%	1	1	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20	20	20	100%	20	20	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35	35	35	100%	35	35	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1				1	1	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		18	18	18	100%	18	18	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		1	1	1	100%	1	1	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		2	1	1	100%	12	12	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1	1	1	100%	1	1	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		1	1	1	100%	12	12	
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		1	1	1	100%	1	1	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		1	1	1	100%	1	1	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	40	40	40	40	100%	40	40	100%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335	335	335	335	100%	335	335	100%
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	1	1	100%	1	1	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE 4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4	4	4	4	100%	4	4	100%
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1	1	1	100%	1	1	
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		1	1	1	100%	1	1	
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		1	1	1	100%	1	1	
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1						

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	15	15	15	40	267%	40	40	267%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase publikasi data statistik yang tersusun	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1	3	2	67%	15	15	
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS						40	40	

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10	11 = (10/4)*100
221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase cakupan pengamanan informasi	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100	100	100	100	100%	100	100	100%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1	1	1	100%	1	1	

Tabel 2.2.
Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2023

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					6.754.859.145	6.040.210.886	89%
216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.638.859.145	5.926.138.446	89%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM OPD	82	81.75	99.7%	5.119.056.545	4.695.519.688	92%
		Nilai SAKIP OPD	72	75.26	105%			
		Persentase ketercapaian pelayanan umum	100	100	100%			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100	100	100%	26.000.000	19.449.300	75%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%	7.000.000	5.868.000	84%
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100%	5.000.000	2.086.300	42%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100%	9.000.000	8.195.000	91%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	5.000.000	3.300.000	66%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	2	2	100%	3.144.441.545	3.045.295.833	97%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	33	100%	3.075.726.545	2.979.969.433	97%
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100%	63.715.000	63.196.400	99%
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	5.000.000	2.130.000	43%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100%	147.800.000	103.443.093	70%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	18.800.000	15.488.900	82%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	18.000.000	8.143.500	45%
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100%	10.000.000	8.267.150	83%
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%	25.000.000	24.154.900	97%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100%	8.000.000	7.904.000	99%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100%	3.000.000	2.760.000	92%
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100%	15.000.000	14.865.500	99%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	50.000.000	21.859.143	44%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100	100	100%	1.733.000.000	1.465.183.962	85%
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	100%	2.200.000	930.000	42%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	1.120.800.000	888.249.837	79%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%	610.000.000	576.004.125	94%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100	100	100%	67.815.000	62.147.500	92%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	100%	40.000.000	35.997.500	90%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	100%	15.000.000	13.600.000	91%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18	18	100%	12.815.000	12.550.000	98%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100	100	100%	1.095.302.600	1.005.914.364	92%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100	100	100%	1.095.302.600	1.005.914.364	92%
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	1	100%	14.200.000	13.002.000	92%
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	1	100%	353.582.600	348.306.530	99%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	100%	160.000.000	82.464.834	52%
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	1	100%	20.000.000	19.843.000	99%
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	1	100%	537.520.000	532.298.000	99%
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	1	100%	10.000.000	10.000.000	100%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	41	41	100%	424.500.000	224.704.394	53%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335	335	100%	59.000.000	16.480.000	28%
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	59.000.000	16.480.000	28%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE 4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4	4	100%	365.500.000	208.224.394	57%
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	1	100%	85.000.000	67.463.461	79%
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	1	100%	230.500.000	127.569.232	55%
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	1	100%	50.000.000	13.191.701	26%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6= (5/4)*100	7	8	9 = (8/7)*100
220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					66.000.000	65.124.500	99%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	15	40	267%	66.000.000	65.124.500	99%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase publikasi data statistik yang tersusun	100	100	100%	66.000.000	65.124.500	99%
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	2	67%	66.000.000	65.124.500	99%
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS						
221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					50.000.000	48.947.940	98%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase cakupan pengamanan informasi	100	100	100%	50.000.000	48.947.940	98%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100	100	100%	50.000.000	48.947.940	98%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	100%	50.000.000	48.947.940	98%

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2023, secara umum target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Faktor-faktor yang mendukung dalam mencapai target kinerja tersebut adalah:

- a. Kesadaran penyediaan informasi publik dari seluruh OPD mendukung pencapaian keterbukaan informasi publik;
- b. Meningkatnya penyediaan layanan publik berbasis sistem elektronik yang terintegrasi mendukung pencapaian SPBE;
- c. Realisasi kinerja dipengaruhi oleh semakin meningkatnya komitmen Dinkominfo dalam menjaga konsistensi Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Indikator kinerja pada tahapan perencanaan dan penganggaran;
- d. Koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen renja dan dalam hal pengawalan target realisasi anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Di dalam Renstra Dinkominfo, disebutkan bahwa Dinkominfo Kabupaten Rembang memiliki 4(empat) sasaran strategis yang diuraikan kedalam 7(tujuh) indikator sasaran, dimana Tahun 2023 merupakan tahun ke-2(dua) pelaksanaan Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Capaian kinerja Dinas Komunikas dan Informatika dengan 4(empat) indikator sasaran, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nilainya untuk tahun 2023 sebesar 3,64 dengan predikat “sangat baik” meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,19 dengan predikat ‘baik”. Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Rembang, sudah dapat menggambarkan predikat “sangat baik” dalam penerapan SPBE. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah pada penerapan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan penerapan aplikasi administrasi pemerintahan yang sebagian besar telah terintegrasi satu dengan lainnya, serta aplikasi layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait. Integrasi ini menjadikan proses bisnis yang ada menjadi lebih efektif. Aspek yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan adalah pada aspek TIK yaitu ketersediaan jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah yang menghubungkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Reviu kebijakan dan reviu pengelolaan aplikasi harus selalu dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam hal keamanan informasi, melalui forum persandian dan keamanan informasi berupaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Selain itu juga dilakukan audit keamanan informasi bagi perangkat daerah untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan informasi. Tidak semua perangkat daerah memiliki SPBE khusus yang diimplementasikan pada perangkat daerah tersebut, maka untuk mengukur tingkat keamanan informasi dimulai dari pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi. Pada laporan tingkat keamanan informasi tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.2 Tahun 2021 yang dibuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merujuk pada ISO 27001 dengan skor 290. Penilaian menggunakan Indeks KAMI dilakukan pada 7 (tujuh) area yaitu :

- a. Kategori Sistem Elektronik (SE)
- b. Tata Kelola Keamanan Informasi
- c. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- d. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- e. Pengelolaan Aset Keamanan Informasi
- f. Teknologi dan Keamanan Informasi
- g. Suplemen

Pada indikator Keterbukaan Informasi Publik (KIP) , nilai skor untuk tahun 2023 sebesar 95,46 dengan kategori “Informatif” mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 85,98 dengan kategori “Menuju Informatif”. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan mempertimbangkan hal-hal, antara lain: monitoring dan evaluasi badan publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian Self Assesment Quisioner (SAQ) melalui aplikasi E-monev, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik.

Dengan melihat perkembangan dari tahun ke tahun, seperti variabel skoring kinerja masing-masing indikator mengalami penajaman dan perluasan cakupan, maka Dinkominfo Kabupaten Rembang perlu melakukan penyesuaian strategi kebijakan dan tidak boleh puas dengan hasil kinerja saat ini. Dinkominfo Kabupaten Rembang ke depan memiliki tantangan yang berat karena berhubungan dengan pengembangan teknologi informasi dimana dinamikanya sangat cepat.

Adapun Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disajikan oleh tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

No	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renstra Tahun 2021-2026									
1	Indikator Tujuan									
	Indeks SPBE	3,20	3,23	3,30	3,35	3,19	3,64	3,30	3,35	Hasil evaluasi SPBE tahun 2023 meningkat 0,45 dari tahun sebelumnya. Hal ini terkait penguatan dari sisi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan TIK.
2	Indikator Sasaran									
a.	Indeks Kebijakan	3,00	3,03	3,06	3,09	3,40	4,50	3,06	3,09	Indeks Kebijakan Internal SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah dilakukan reviu kebijakan internal SPBE
b.	Indeks Tatakelola	2,60	2,63	2,66	2,69	2,70	3,10	2,66	2,69	Indeks tata kelola SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah ditetapkan SK Bupati terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
c.	Indeks Penerapan Manajemen	2,18	2,21	2,24	2,27	2,55	2,36	2,24	2,27	Indeks manajemen SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena manajemen SPBE telah ditetapkan pada Peta Rencana SPBE

No	Indikator Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d.	Indeks layanan	3,63	3,66	3,69	3,72	3,63	4,14	3,69	3,72	Indeks layanan SPBE mengalami peningkatan, hal ini karena telah dilakukan reviu pada layanan aplikasi adm pemerintah dan publik serta telah di lakukan integrasi antar sistem
e.	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	290	300	310	320	294	290	310	320	Adanya penurunan penilaian pada area Tata Kelola, Pengelolaan Risiko dan peningkatan pada area Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset
f.	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	90	90	90	85,98	95,46	90	90	Skor KIP mengalami peningkatan signifikan sebesar 8,58 dari nilai semula tahun 2022 yaitu 85,98. sekaligus terdapat peningkatan pemeringkatan dari kategori menuju informatif menjadi informatif. Hal ini dikarenakan capaian nilai pada publikasi website dan medsos PPID telah maksimal dan kehadiran bupati dalam uji publik (tahapan akhir penilaian) ikut mendongkrak nilai KIP.
g.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	55	60	65	70	55	100	65	70	Kesadaran OPD dalam mengumpulkan data mulai naik, Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan desk daftar data, membuat group atau media komunikasi antara OPD untuk pengumpulan data sehingga jika ada kesulitan terkait pengumpulan data segera diselesaikan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang dapat tergambarkan melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu-isu penting Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai Pendukung Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan;

SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan SPBE pada tingkat daerah, dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Implementasi transformasi digital terdapat pada 4 bidang fasilitasi, yaitu: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Pengembangan layanan publik dengan SPBE sebagai salah satu fokus kegiatan dalam menyukseskan 8 Prioritas RKPD Tahun 2025, dapat memberikan peluang untuk mendorong dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun layanan SPBE, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang telah diimplementasikan secara elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Layanan Perencanaan
- b. Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- c. Layanan Penganggaran
- d. Layanan Keuangan
- e. Layanan Kepegawaian
- f. Layanan Kearsipan
- g. Layanan Pengelolaan BMN
- h. Layanan Pengawasan Internal
- i. Layanan Akuntabilitas Organisasi
- j. Layanan Kinerja Pegawai
- k. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- l. Layanan Dasar Data Terbuka
- m. Layanan JDIH
- n. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- o. Layanan Dasar Data Terbuka
- p. Layanan JDIH

Nilai capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rembang untuk tahun 2023 sebesar 3,64 dengan predikat “Sangat Baik” dan telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Rembang untuk tahun 2023 sebesar 3,23 (Baik). Nilai indeks SPBE tersebut mengalami kenaikan 0,45 dari tahun sebelumnya 2022 sebesar 3,19 dengan predikat “baik”. Namun pada domain manajemen SPBE masih terdapat indikator yang masih dibawah target yaitu penerapan manajemen pengetahuan, penerapan manajemen perubahan dan indikator pembangunan aplikasi pada domain tata kelola. Oleh karena itu diperlukan akselerasi pemenuhan persyaratan dalam penilaian SPBE, terutama dokumen & operasional.

2. Pengelolaan Data Pemerintah Daerah secara Terpadu dan Terintegrasi

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua *stakeholder* dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena data yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan seringkali kurang akurat, relevan dan *uptodate*, sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan data yang terpadu, akurat dan *uptodate* serta kolaborasi antar aplikasi organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang. Penyelenggaraan Satu Data Rembang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Hal ini diawali dengan pengelolaan Big Data, dimana data yang dibutuhkan sangat besar, bervariasi dan selalu *realtime*. Pemerintah Kabupaten Rembang merencanakan penggunaan Big Data untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga ke depan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik.

3. Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Suatu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses control masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dilakukan secara transparan, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* yakni badan publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat,

serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas.

Dinkominfo Kabupaten Rembang selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Kabupaten Rembang agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki badan publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, badan publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID). Terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan Dinkominfo Kabupaten Rembang yang belum optimal, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan analisis isu publik sehingga informasi dan respon Pemerintah Kabupaten Rembang lebih tepat sasaran;
 - b. Peningkatan jumlah dan jenis konten media publik serta optimalisasi CB FM;
 - c. Platform aduan publik yang terintegrasi antar OPD.
4. Ketersediaan Data Statistik Sektorial Masih Kurang

Ketersediaan data statistik sektoral yang valid mempunyai peran yang penting yaitu sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan maupun kebijakan pemerintah daerah lainnya. Untuk menghasilkan data statistik sektoral yang valid, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain : koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan Satu Data Rembang, serta peningkatan SDM Wali Data Pendukung.

5. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE.

Salah satu program unggulan di dalam RPJMD Kabupaten Rembang adalah “*Digitalisasi Birokrasi dan Rembang Smartcity*” dimana pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka optimalisasi keamanan informasi yang merupakan urusan persandian di Dinkominfo Kabupaten Rembang, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Fasilitasi untuk operasionalisasi Tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Rembang.
 - b. Peningkatan Kualitas SDM pengelola *cyber security*.
 - c. Pengajuan Layanan *Information Technology Security Assesment* (ITSA).
6. Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Yang Bertujuan Membangkitkan Potensi Masyarakat di Kabupaten Rembang
- Dengan supporting teknologi informasi diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang telah terbangun, sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya dalam menggali potensi-potensi ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

2.4. Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025

Dari hasil pencermatan internal, secara umum usulan kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Rembang sudah terakomodir di dalam RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025. Secara lebih detail dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.560.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.560.000.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.870.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.870.000.000	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Nilai IKM Persentase ketercapaian pelayanan umum	73 Skor 83 Skor 100 %	6.015.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Nilai IKM Persentase ketercapaian pelayanan umum	73 Skor 83 Skor 100 %	6.015.000.000	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100 %	25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100 %	25.000.000	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik / dokumen yang disusun	3 Dokumen	3.741.325.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik / dokumen yang disusun	3 Dokumen	3.741.325.000	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.559.325.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.559.325.000	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01. 2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
2.16.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	202.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	202.000.000	
2.16.01. 2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	
2.16.01. 2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
2.16.01. 2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
2.16.01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
2.16.01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
2.16.01. 2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100 %	1.861.675.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan	100 %	1.861.675.000	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.675.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.675.000	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.250.000.000	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	610.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	610.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 %	185.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 %	185.000.000	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	50.000.000	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	15.000.000	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	20.000.000	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100 %	760.000.000	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Persentase cakupan pelayanan informasi publik	100 %	760.000.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100 %	760.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100 %	760.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02. 2.01. 0014	Relasi Media	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan : 1. Press release 2. Media visit 3. Media gathering 4. Press tour 5.press conference	75.000.000	Relasi Media	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan : 1. Press release 2. Media visit 3. Media gathering 4. Press tour 5.press conference	75.000.000	
2.16.02. 2.01. 0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	60.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	60.000.000	
2.16.02. 2.01. 0017	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	150.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	150.000.000	
2.16.02. 2.01. 0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Rekomendasi	140.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Rekomendasi	140.000.000	
2.16.02. 2.01. 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	185.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	185.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Konten Informasi Publik	1565 Konten	150.000.000	Penyusunan Konten	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Konten Informasi Publik	1565 Konten	150.000.000	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100 %	1.095.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100 %	1.095.000.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335 OPD dan Desa	120.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id	335 OPD dan Desa	120.000.000	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	120.000.000	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	120.000.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan tata kelola SPBE	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	975.000.000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan tata kelola SPBE	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	975.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.03. 2.02. 0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	275.000.000	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	275.000.000	
2.16.03. 2.02. 0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	40 Perangkat Daerah	250.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	40 Perangkat Daerah	250.000.000	
2.16.03. 2.02. 0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	450.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40 Perangkat Daerah	450.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				445.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				445.000.000	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	100%	445.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	100%	445.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase publikasi data statistik yang tersusun	100%	445.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase publikasi data statistik yang tersusun	100%	445.000.000	
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40 Staf Statistik OPD 5 Staf Statistik Internal Dinkominfo	240.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40 Staf Statistik OPD 5 Staf Statistik Internal Dinkominfo	240.000.000	
2.20.02.2.01.0018	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	70.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	70.000.000	
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	135.000.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	135.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				245.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				245.000.000	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase Cakupan Pengamanan Informasi	100 %	245.000.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase Cakupan Pengamanan Informasi	100 %	245.000.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100 %	245.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100 %	245.000.000	

Kode	RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02. 2.01. 0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000	
2.21.02. 2.01. 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	20.000.000	
2.21.02. 2.01. 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	160.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	160.000.000	
2.21.02. 2.01. 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 Perangkat Daerah	15.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 Perangkat Daerah	15.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan atau *planning* adalah bagian dari daur kegiatan manajemen terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem perencanaan pembangunan yang bersifat *Bottom-Up Planning*. *Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan, bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Dinkominfo Tahun 2025 disajikan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pemerintah pusat yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah, terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, antara lain :

1. Pemanfaatan sumber daya infrastruktur dan manusia yang ada, agar percepatan digitalisasi pemerintahan dapat terwujud sehingga selaras dengan program prioritas nasional;
2. Penguatan Indeks SPBE harus tetap digaungkan dalam Renja Tahun 2025 dalam rangka percepatan digitalisasi pemerintahan di daerah;
3. Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2024–2025 yang telah disusun oleh pusat agar dipedomani dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data Rembang dengan leading sektor di Bappeda sebagai sekretariat Satu Data Rembang;
4. Penyediaan 16 jenis layanan keamanan informasi yang ditujukan kepada kepala daerah dan wakilnya, OPD, pegawai dan aparatur sipil, serta pihak lainnya, sehingga pemerintah daerah perlu membentuk dan menyusun pedoman manajemen layanan keamanan informasi yang mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.

Arahan strategi kebijakan pemerintah pusat yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Percepatan pengelolaan transformasi digital sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan strategi:

- a. Penguatan koordinasi antar instansi pusat, untuk percepatan penyelesaian target SPBE dalam Rencana Induk dan Peta Rencana Tahun 2021-2025 melalui penyelarasan perencanaan dan penganggaran SPBE di K/L/D sebagai bagian program nasional, serta implementasi Arsitektur SPBE Nasional yang berbasis proses bisnis lintas sektor pemerintahan (*Government Enterprise Architecture*);
- b. Penguatan peran Tim Koordinasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelaraskan perencanaan dan pembangunan sistem informasi K/L/D, agar dapat mewujudkan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi (*digital services*), role model : layanan bantuan pemerintah terintegrasi dan layanan perizinan pemerintah terintegrasi;
- c. Percepatan terwujudnya sistem penghubung layanan pemerintah, sehingga terjadi kolaborasi data melalui penerapan manajemen data oleh seluruh wali data K/L/D menjadi layanan digital pemerintah yang terintegrasi (*Smart Government*);
- d. Percepatan pemanfaatan transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan Big Data Pemerintah dan kecerdasan artifisial, sebagai bagian transformasi digital nasional.

2. BSSN (Badan Syber dan Sandi Negara)

Penanganan ancaman siber untuk pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan strategi:

- a. Strategi *Preventif*:
 - 1) Penyelarasan Kebijakan dan Kegiatan dengan Strategi Keamanan Siber Nasional;

- 2) Melakukan pengujian keamanan secara berkala bagi sistem elektronik yang digunakan pada layanan publik;
 - 3) Melakukan penilaian tata kelola keamanan siber;
 - 4) Literasi keamanan siber pada pemangku kepentingan.
- b. Strategi *Proaktif* dan *Reaktif*:
- 1) Penyusunan rencana kontigensi;
 - 2) Pembentukan dan optimalisasi tugas Tim Tanggap Insiden Siber;
 - 3) Melakukan pelaporan secara proaktif apabila terjadi insiden potensi ancaman keamanan siber.
- c. Strategi *Deterrent*:
- 1) Kolaborasi dengan penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan kejahatan siber;
 - 2) Membentuk forum koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

3. BPS (Badan Pusat Statistik)

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia, dengan strategi:

- a. Adanya uraian tujuan, target, indikator yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat;
- b. Mendukung kebijakan Perencanaan Pembangunan, SPBE, KSP, PDN, hasil keputusan Dewan Pengarah SDI dan isu strategis yang dilaksanakan oleh SDI;
- c. Mendukung Daftar Data Prioritas yang dirumuskan Forum SDI tingkat pusat tahun 2020-2021 dari proses pengumpulan hingga penyebarluasan Data Prioritas termasuk Data Dana Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Dana Subsidi;
- d. Program dan kegiatan yang akan dilakukan menerapkan prinsip-prinsip SDI yang meliputi standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas data;

- e. Program dan kegiatan yang dilakukan mendukung pemanfaatan data mengacu pada data prioritas daerah dan pusat;
- f. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi mendukung integrasi KRISNA dan SAKTI sesuai dengan kesepakatan Rapat Dewan Pengarah SDI;
- g. Memastikan kolaborasi antar penyelenggara SDI dalam implementasi tata Kelola data dan pengelolaan standar kualitas data yang terdapat dalam Portal.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan kinerja pembangunan yang akan dicapai oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan selama Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial;
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.

Dalam mewujudkan 3 (sasaran) tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan kebijakan program strategis sebagai berikut :

- 1. Pembangunan Pusat Data Tahap II
 Penyempurnaan pembangunan pusat data di tahap II ini bertujuan untuk mencapai sertifikasi rated III secara fasilitas (Standarisasi ANSI/TIA 942), dimana sertifikat SNI/Internasional tersebut merupakan syarat dasar untuk dapat diintegrasikan dengan ekosistem Pusat Data Nasional (PDN);
- 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik baik melalui media berbasis elektronik (TV, Radio, Media Online dan Media Sosial) maupun media komunikasi interpersonal Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),

dan Pertunjukan Rakyat (PETUNRA), dalam rangka mengcounter hoax dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tepat sasaran, sehingga tercapai layanan pemerintahan yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat;

3. Mewujudkan Big Data Jawa Tengah, dengan strategi menyusun Arsitektur Big Data Jawa Tengah sebagai kerangka acuan, dan pengembangan sumber daya manusia pengelola data;
4. Penguatan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan strategi penguatan layanan seperti *Secure Socket Layer* (SSL), Firewall dan Anti Virus untuk memperkuat keamanan sistem atau aplikasi dari sisi lalu lintas data dan keamanan *workstation* pengguna, serta pemberian literasi keamanan informasi kepada OPD Provinsi Jateng, Kabupaten/Kota hingga pada tingkat SMA/SMK se-Jateng, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terhadap ancaman keamanan informasi;
5. Mendorong ketercapaian Keterbukaan Informasi Publik dengan kategori tertinggi yaitu “Informatif”, untuk semua Badan Publik/OPD di seluruh Provinsi Jawa Tengah, sehingga terwujud suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
6. Melaksanakan upaya peningkatan layanan pengelolaan aplikasi informatika dan integrasi antar aplikasi melalui:
 - a. Penetapan terhadap kebijakan penyelenggaraan SPBE dan Tim Koordinasi SPBE;
 - b. Penerapan kebijakan SPBE kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. Penerapan kebijakan SPBE melalui penyampaian petunjuk teknis/NSPK (SOP, SE, Surat) kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - d. Monev dan pengembangan layanan elektronik yang sudah ada (minimal 1 tahun sekali);
7. Mewujudkan *Smart Province* khususnya pada dimensi *Smart Governance*, melalui upaya penyusunan *Rencana Induk Smart Province* periode 2024-2026.

c. Telaahan terhadap Kebijakan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025 disebutkan bahwa tema RKPD Tahun 2025 adalah *“Memantapkan kualitas infrastruktur dan kelestarian lingkungan hidup, peningkatankualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pertumbuhan ekonomimenuju Rembang Gemilang pembangunan”* dengan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
3. Peningkatan Perekonomian dengan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;
5. Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
7. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
8. Percepatan Kemandirian Desa.

Salah satu prioritas RKPD tahun 2025 adalah *“Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah”* dimana untuk mewujudkan prioritas tersebut, salah satu strategi yang diambil adalah pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *smart city*. Hal ini sejalan dengan salah satu program unggulan daerah sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu *“Digitalisasi Birokrasi & Rembang Smart City”* dimana Dinkominfo Kabupaten Rembang berperan sebagai OPD pengampu untuk menyukseskan program unggulan tersebut. *Digitalisasi Birokrasi* merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan berbasis *information Technology (IT)*. Hal ini dilakukan dengan jalan penyederhanaan layanan melalui tagline *“Ora Ribet Birokrasiku”* dan Keterbukaan Informasi melalui tagline *“Gamblang Pemerintahku”*.

Sedangkan “*Rembang Smart city*” merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan masyarakat berbasis *information Technology (IT)*. Implementasi dari “*Rembang Smart city*” adalah melalui akses pemanfaatan internet dan komunikasi melalui tagline “*APIK-Desaku*”. Dalam hal ini pemerintah berupaya memberikan akses internet gratis pada publik guna menunjang aktivitas warga desa yang membutuhkan koneksi internet. Untuk mendukung digitalisasi birokrasi tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan beberapa kebijakan/regulasi antara lain :

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Rembang yang akan menjadi pedoman dan arah bagi pembangunan SPBE.

Untuk Mewujudkan *Smart City* Lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan *Smart City* di dalam *Masterplan Smart City* dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Ada 6 (enam) dimensi dalam *Rembang Smart City Development* antara lain : *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart People* dan *Smart environment*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan strategis urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026 adalah *“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”*. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Rembang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”*. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 'menunjang misi ke-1(satu) yaitu *“Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi”*. Salah satu tujuan dari misi ke 1(satu) adalah *“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”* dengan sasaran *“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”*. Salah satu indikator sasaran tersebut adalah *“Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”* yang merupakan indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien;
- 2) Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik;
- 4) Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral.

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Indikator Tujuan : Indeks SPBE	angka	3,11	2,76	3,20	3,23	3,3	3,35	3,40
2			Indikator Sasaran								
a.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	angka	2,53	2,80	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12
b.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks tatakelola	angka	2,43	2,20	2,60	2,63	2,66	2,69	2,72
c.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks penerapan manajemen	angka	0	1,00	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d.		Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks layanan	angka	3,64	3,69	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75
e.		Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	angka	2,80	289	290	300	310	320	330
f.		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	angka	93,4	59,85	90	90	90	90	90
g.		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	50	50	55	60	65	70	75

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g Penyediaan Bahan/Material
- h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a Relasi Media
- b Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- c Pelayanan Informasi Publik
- d Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- e Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- f Penyusunan Konten

C Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

2 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

- b Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
- c Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

II Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

A Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- b Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- c Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

III Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

A Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- c Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- d Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Secara garis besar Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	:	Rp7.870.000.000,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	:	Rp445.000.000,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	:	Rp245.000.000,00
Jumlah Anggaran Renja Tahun 2025		:	Rp8.560.000.000,00

Jumlah anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 3 urusan, 5 program, 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 tersaji pada tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.560.000.000				8.845.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.870.000.000				8.111.500.000
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Nilai IKM Persentase ketercapaian pelayanan umum		73 Skor 83 Skor 100 %	6.015.000.000			74 Skor 84 Skor 100 %	6.121.500.000
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan		100 %	25.000.000		-	100 %	28.250.000
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	2 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	2 Dokumen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	6.000.000
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	3 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3 Laporan	5.250.000
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	6.000.000
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik / dokumen yang disusun		3 Dokumen	3.741.325.000		-	3 Dokumen	3.802.150.000
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	37 Orang/ bulan	3.559.325.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	37 Orang/ bulan	3.620.050.000
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	12 Dokumen	180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Dokumen	180.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	2.100.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	202.000.000		-	100 %	222.300.000
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	15.000.000
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	60.000.000
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	10.500.000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	26.000.000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	8.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	6.300.000
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	16.000.000
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	12 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	80.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan		100 %	1.861.675.000		-	100 %	1.861.800.000
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	1.675.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	1.800.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	12 Laporan	1.250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	1.250.000.000
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	610.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	610.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Barang Milik Daerah yang Dipelihara		100 %	185.000.000		-	100 %	207.000.000
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	18 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	18 Unit	60.000.000
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	35 Unit	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	35 Unit	16.000.000
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Unit	110.000.000
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	18 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	18 Unit	21.000.000
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase cakupan pelayanan informasi publik		100 %	760.000.000			100 %	810.000.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD		100 %	760.000.000		-	100 %	810.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	5 Laporan : 1. Press release 2. Media visit 3. Media gathering 4. Press tour 5.press conference	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Laporan : 1. Press release 2. Media visit 3. Media gathering 4. Press tour 5.press conference	80.000.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Komunitas	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Komunitas	70.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	5 Permohonan	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Permohonan	160.000.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	4 Rekomendasi	140.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Rekomendasi	150.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Media	185.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Media	190.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1565 Konten	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1565 Konten	160.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan		100 %	1.095.000.000			100 %	1.180.000.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD yang menggunakan domain dan sub domain rembangkab.go.id		335 OPD dan Desa	120.000.000		-	335 OPD dan Desa	130.000.000
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	130.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE		4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	975.000.000		-	4 Layanan : 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	1.050.000.000
2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	275.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	40 Perangkat Daerah	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	40 Perangkat Daerah	275.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	40 Perangkat Daerah	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	40 Perangkat Daerah	475.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				445.000.000				470.000.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota		100%	445.000.000			100%	470.000.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase publikasi data statistik yang tersusun		100%	445.000.000		-	100%	470.000.000
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	40 Staf Statistik OPD 5 Staf Statistik Internal Dinkominfo	240.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	40 Staf Statistik OPD 5 Staf Statistik Internal Dinkominfo	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02.2.01.0018	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	100%	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100%	80.000.000
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	100%	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100%	140.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				245.000.000				263.500.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Pengamanan Informasi		100 %	245.000.000			100 %	263.500.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya		100 %	245.000.000		-	100 %	263.500.000
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	2 Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Laporan	22.000.000
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	1 Laporan	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	170.000.000
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Rembang, Rembang, Kutoharjo	40 Perangkat Daerah	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	40 Perangkat Daerah	16.500.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025 dimana tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2025 ini lebih bersifat operasional dan berguna sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini, juga mengacu berbagai dokumen terkait di bidang urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian dengan mempertimbangkan berbagai masukan melalui pendekatan teknokratis dan demokratis serta memperhatikan perkembangan isu-isu strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas berbasis elektronik. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya diarahkan untuk mendukung salah satu program unggulan pada RPJMD Kabupaten Rembang yaitu *“Digitalisasi Birokrasi dan Rembang Smart City”* dimana Dinkominfo Kabupaten Rembang berperan sebagai OPD pengampu dalam rangka mewujudkan program unggulan tersebut.

Keberhasilan program digitalisasi birokrasi akan memberikan berkontribusi pada capaian RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang bertema *“Memantapkan kualitas infrastruktur dan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju Rembang Gemilang Pembangunan”*.

2. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen, maka penyusunan Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan seperti : Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 dan dokumen perencanaan lainnya yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD dan DPRD Kabupaten Rembang.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan

kegiatan pembangunan Dinkominfo Kabupaten Rembang dan sebagai acuan penganggaran pada tahap penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 di SIPD RI.

Melalui Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang semakin komprehensif dan terpadu ini, diharapkan kinerja pembangunan Dinkominfo Kabupaten Rembang dapat semakin terfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini. Akhir kata semoga Renja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini, dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* berbasis *smart city* menuju *Rembang Gemilang 2026*.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. EC GANTIARTO St
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754

Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id

web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>

REMBANG – KODE POS 59212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 000.7/16 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf (a), dan demi lebih efektif serta terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal 19 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Rembang
Nomor : 000.7/16 /2024
Tanggal : 19 Januari 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5	Kepala Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik	Anggota
9	Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota
10	Sub Koordinator Tata Kelola Informatika	Anggota
11	Sub Koordinator Layanan Informatika	Anggota
12	Kepala Seksi Statistik	Anggota
13	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG


Drs. E.C. GANTARTO St
Pembina Muda
NIP. 19631226 199401 1 001